

## DAFTAR ISI

<b>HALAM JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>III</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>X</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>XV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah .....	6
1.3 Tujuan penelitian .....	6
1.4 Manfaat penelitian .....	6
1.5 Metode penelitian.....	7
1.5.1 Tipe penelitian .....	7
1.5.2 Pendekatan .....	8
1.5.3 Sumber bahan hukum .....	10
1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum.....	11
1.5.5 Analisis bahan hukum.....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KEWENANGAN HAKIM MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>14</b>
2.1 Kerugian negara dalam tipikor.....	14
2.2 Wewenang menilai dan menghitung kerugian negara .....	21
2.3 Kewenangan hakim menilai kerugian negara .....	23
<b>BAB III IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>29</b>
3.1 Pengaruh Nilai Kerugian Negara Terhadap Penjatuhan Pidana .....	29
3.2 Tolak Ukur Hakim Menilai Sendiri Kerugian Negara.....	31
3.3 Anotasi Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby. ....	34
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>43</b>

4.1 Kesimpulan .....	43
4.2 Saran .....	44
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>XVI</b>

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

## **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

### **MAKAMAH KONSTITUSI**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016.

### **PENGADILAN NEGERI**

Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor 52/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby. 31 Oktober 2019.